



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia

Analysis Of Stunting Reduction Policies In Indonesia

Sri hajijah purba¹Saharani Saari Dewi², Nabila Wahyuni³, Zakiatus Sabrina⁴,
Miftahul Nur Zahrah⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: E-mail: srihajijahpurba@uinsu.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Stunting
Kebijakan
Kesehatan

Keywords:

Stunting
Policy
Health

DOI:

[10.56338/jks.v9i7.11749](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11749)

ABSTRAK

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan gizi kronis yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tingginya prevalensi stunting menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah melalui database Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan Garuda menggunakan kata kunci terkait kebijakan stunting dan implementasinya di Indonesia. Kriteria inklusi meliputi artikel yang diterbitkan tahun 2020–2025, tersedia dalam full text, dan relevan dengan fokus penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia telah dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kerja sama lintas sektor. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, ketimpangan akses layanan kesehatan di beberapa daerah juga memengaruhi efektivitas program penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi edukasi masyarakat agar implementasi kebijakan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Stunting remains one of the chronic nutritional problems affecting the quality of human resources in Indonesia. The high prevalence of stunting indicates that efforts to reduce stunting still face various challenges in policy implementation. This study aims to analyze the implementation of stunting reduction policies in

Indonesia using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The study was conducted by reviewing scientific articles from Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, and Garuda databases using keywords related to stunting policy and implementation in Indonesia. The inclusion criteria included articles published between 2020–2025, available in full text, and relevant to the research focus. The results show that the implementation of stunting reduction policies in Indonesia has been carried out through specific and sensitive nutrition interventions, strengthening maternal and child health services, and cross-sector collaboration. However, policy implementation still faces various obstacles such as limited coordination among institutions, lack of human resources, limited budgets, and low community participation. In addition, unequal access to health services in several regions also affects the effectiveness of stunting reduction programs. Therefore, strengthening cross-sector coordination, improving the quality of health services, and optimizing public education are necessary to improve the effectiveness and sustainability of stunting reduction policy implementation.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di dunia, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kondisi tersebut menyebabkan anak memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar usianya serta berdampak terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas pada masa dewasa.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat apabila prevalensinya berada di atas 20%. Berdasarkan data WHO dan UNICEF tahun 2023, prevalensi stunting global masih mencapai sekitar 22,3% atau sekitar 148 juta balita di seluruh dunia mengalami stunting. Kawasan Asia masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus stunting tertinggi, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Di Indonesia, stunting masih menjadi perhatian utama pemerintah karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih berada di atas standar WHO sehingga menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Permasalahan stunting tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif sehingga dapat memengaruhi kemampuan belajar di sekolah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya risiko penyakit degeneratif pada usia dewasa seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, stunting dipandang sebagai ancaman terhadap pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi penerus bangsa.

Stunting dapat terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun akibat kurang optimalnya pemenuhan gizi pada periode emas pertumbuhan anak. Faktor penyebab stunting bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya asupan gizi. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya stunting meliputi rendahnya tingkat pendidikan ibu, kurangnya pengetahuan mengenai gizi dan pola asuh anak, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, buruknya sanitasi lingkungan, kemiskinan, serta rendahnya kualitas konsumsi pangan keluarga. Selain itu, kurang optimalnya pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) juga menjadi faktor risiko terjadinya stunting pada balita.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam percepatan penurunan stunting melalui program intervensi gizi spesifik dan sensitif. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, kampanye ASI eksklusif, peningkatan sanitasi lingkungan, serta penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain RPJMN, pemerintah Indonesia juga memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penurunan stunting harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui konvergensi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat. Pendekatan lintas sektor tersebut bertujuan untuk memastikan setiap sasaran memperoleh pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, akses air minum layak, sanitasi, perlindungan sosial, serta edukasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, keberhasilan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, kebijakan penanggulangan stunting melibatkan berbagai sektor seperti sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Pendekatan lintas sektor tersebut dilakukan karena stunting merupakan masalah multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi kesehatan semata. Oleh karena itu, keberhasilan program penanggulangan stunting sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program kesehatan.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana program maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas kesehatan, dan dukungan birokrasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan stunting.

Selain dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, implementasi kebijakan penanggulangan stunting juga memerlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring yang efektif memungkinkan pemerintah mengidentifikasi hambatan implementasi secara dini, sedangkan evaluasi memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program secara konsisten di setiap tingkat pemerintahan.

Meskipun berbagai program percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

koordinasi lintas sektor masih belum berjalan optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih ditemukan di beberapa daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan sanitasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting. Selain itu, ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan stunting di Indonesia.

Penelitian mengenai kebijakan penanggulangan stunting sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kesehatan dan prevalensi stunting, sedangkan penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan stunting secara komprehensif melalui pendekatan Systematic Literature Review masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat program, serta rekomendasi dalam meningkatkan keberhasilan penanggulangan stunting di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. Metode Systematic Literature Review dipilih karena mampu memberikan sintesis ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya mengenai kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Pencarian literatur dilakukan pada bulan Mei 2026 melalui beberapa database akademik, yaitu Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan Garuda. Pemilihan database tersebut dilakukan karena memiliki cakupan artikel ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian. Proses pencarian artikel dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean untuk memperoleh artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Kata kunci yang digunakan meliputi “stunting”, “kebijakan penanggulangan stunting”, “implementasi kebijakan stunting”, “stunting prevention”, “stunting policy”, dan “nutrition policy”. Kombinasi pencarian dilakukan menggunakan operator Boolean seperti (“stunting” AND “policy implementation”), (“stunting prevention” OR “nutrition policy”), dan (“kebijakan stunting” AND Indonesia).

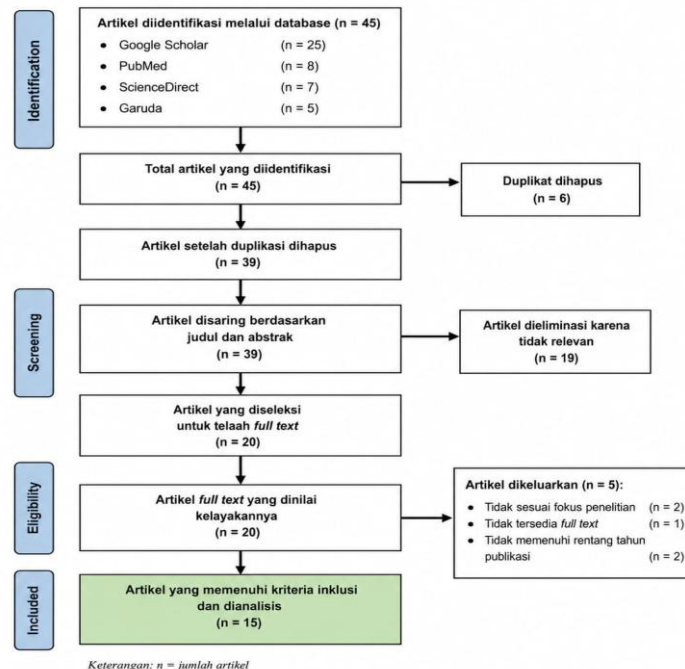
Proses seleksi artikel dilakukan menggunakan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri dari tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan seleksi akhir. Pada tahap identifikasi, peneliti menemukan sejumlah artikel dari database yang digunakan. Selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap artikel duplikat dan artikel yang tidak sesuai dengan topik penelitian. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
Artikel diterbitkan tahun 2020-2025	Artikel sebelum tahun 2020
Full text tersedia	Hanya abstrak
Membahas implementasi kebijakan stunting	Tidak membahas kebijakan
Penelitian di Indonesia	Penelitian di luar Indonesia yang tidak relevan
Artikel jurnal ilmiah	Skripsi, tesis, prosiding, opini

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap berdasarkan pedoman PRISMA. Tahap pertama adalah identifikasi seluruh artikel yang diperoleh dari database. Selanjutnya dilakukan penghapusan artikel duplikat. Artikel yang tersisa kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan (eligibility) melalui pembacaan teks lengkap (full text). Artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi selanjutnya dimasukkan ke dalam proses sintesis.

Gambar 1. Diagram Alur Seleksi Literatur Berdasarkan Pedoman PRISMA



Analisis data dilakukan menggunakan metode thematic synthesis. Seluruh temuan dari artikel yang telah lolos seleksi dikodekan berdasarkan kesamaan makna (open coding), kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang selanjutnya disintesis menjadi tema-tema utama implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. Tema yang dihasilkan meliputi komunikasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan. Hasil sintesis selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

HASIL

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari database Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan Garuda, diperoleh sejumlah artikel yang relevan terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. Setelah dilakukan proses seleksi menggunakan pendekatan PRISMA, diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu komunikasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta efektivitas program.

Tabel 1. Karakteristik Artikel yang Direview

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
(Nurva et al.,2023)	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, namun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat.
(Saputra et al., 2022)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga	Penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan stunting.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, keterlibatan organisasi pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial masyarakat dalam program percepatan penurunan stunting.
(Anggraeni et al., 2023)	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Indonesia.	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penanggulangan stunting meliputi kurangnya koordinasi pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, rendahnya edukasi masyarakat terkait gizi, serta belum optimalnya

			integrasi program kesehatan dan sanitasi.
(Siswati, 2024)	Analisis Kebijakan RAD Membangun Generasi Unggul melalui 8000 HPK di Kota Yogyakarta.	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan evaluasi kebijakan percepatan penurunan stunting.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta didukung oleh komitmen pimpinan daerah, tata kelola stunting yang baik, serta capaian program yang tinggi. Namun, masih terdapat hambatan berupa kesenjangan ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat ke posyandu, dan akses layanan kesehatan yang belum merata.
Oktavia, R., Siregar, D., & Wahyuni, N. (2024)	Evaluasi Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.	Metode campuran (Mixed Methods) sekuensial eksplanatori.	Menunjukkan adanya penurunan prevalensi angka stunting yang signifikan di tingkat nasional, tetapi pencapaian tersebut belum merata secara spasial dan masih terdapat ketimpangan capaian yang sangat lebar antar-wilayah atau daerah di Indonesia.
Yuliani, E., Rahmawati, D., & Sari, P. (2023)	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Stunting di Daerah Terpencil Indonesia.	deskriptif fenomenologis	kemiskinan yang tinggi di tingkat keluarga serta sulitnya jangkauan akses geografis menuju layanan kesehatan primer menjadi faktor struktural utama yang menghambat keberhasilan kebijakan akselerasi penurunan stunting.

World Health Organization (2023)	Stunting in Children: Global Health Report	Laporan kesehatan global bersifat meta-analisis epidemiologi.	Menegaskan bahwa secara global Indonesia masih dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang dengan angka prevalensi kasus stunting di atas ambang batas aman krisis kesehatan masyarakat, sehingga membutuhkan intervensi gizi terintegrasi.
UNICEF (2023)	Child Nutrition Report	Menjelaskan bahwa manifestasi kasus stunting di berbagai negara berkembang sangat dipengaruhi secara multidimensional oleh status latar belakang sosial ekonomi keluarga, ketahanan pangan tingkat rumah tangga, dan kualitas infrastruktur sanitasi lingkungan.	Stunting dipengaruhi faktor sosial ekonomi dan sanitasi
Kementerian Kesehatan RI (2023)	Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023	Survei nasional kuantitatif dengan sampling kluster.	Memaparkan status riil bahwa angka prevalensi stunting nasional di Indonesia berhasil ditekan hingga menyentuh angka 21,6%, namun angka ini masih berada di atas ambang batas WHO dan memerlukan akselerasi penurunan yang lebih agresif.%
Ponum, M., Khan, S., Hasan, M., & Karim, R. (2020)	Stunting Prevention and Nutritional Policy in Developing Countries	Tinjauan pustaka sistematis (Systematic Literature Review).	Membuktikan secara empiris bahwa formulasi kebijakan intervensi gizi spesifik yang terfokus pada kesehatan ibu hamil, pemenuhan gizi mikro, dan pendampingan balita terbukti sangat

			efektif dalam memotong rantai stunting di negara-negara berkembang.
Boedy, A., Rahman, F., & Putri, N. (2025)	Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.	Analisis kebijakan deskriptif kuantitatif-kualitatif.	Menekankan pentingnya penguatan harmonisasi regulasi di tingkat pusat yang harus diadopsi secara linier oleh pemerintah daerah. Lemahnya integrasi hukum ini sering memicu kebingungan bagi para pelaksana teknis kesehatan di lapangan.
Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017)	Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia.	Kajian literatur sekunder dan analisis data makro.	Menemukan bahwa intervensi gizi sensitif (seperti penyediaan pasokan air bersih, jamban sehat, dan jaminan sosial) memberikan kontribusi hingga 70% terhadap keberhasilan penurunan stunting, melengkapi peran intervensi gizi spesifik.
Fitriani et al. (2023)	Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Penurunan Prevalensi Stunting di Wilayah Pedesaan Indonesia	Kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika empiris.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan perbaikan sanitasi pemukiman berkorelasi positif secara signifikan terhadap penurunan jumlah balita kerdil di pedesaan.
Pratiwi & Handayani (2024)	Evaluasi Kinerja Kader Posyandu dalam Program Percepatan Penurunan Stunting	Kualitatif deskriptif melalui FGD dan wawancara.	Menemukan adanya beban kerja yang berlebih (overload) pada kader Posyandu di lapangan tanpa diimbangi dengan pemberian insentif

			finansial yang layak serta minimnya pelatihan teknis pengukuran antropometri yang objektif.
Rahman & Suryadi (2022)	Peran Kerja Sama Lintas Sektor Menggunakan Pendekatan Pentahelix dalam Kebijakan Akselerasi Penurunan Stunting	Studi kasus kualitatif eksploratif.	Menegaskan bahwa keterlibatan aktif aktor non-pemerintah seperti pihak akademisi, komunitas swasta, media massa, dan pelaku industri (pentahelix) terbukti mempercepat efektivitas dan perluasan jangkauan program intervensi gizi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa artikel yang direview secara umum membahas implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, mixed methods, studi kasus, analisis kebijakan, dan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan stunting sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai program intervensi gizi. Beberapa penelitian juga melaporkan adanya penurunan prevalensi stunting di berbagai daerah sebagai hasil dari pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang didukung oleh tata kelola kebijakan yang baik dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Di sisi lain, sebagian besar penelitian mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait gizi, serta akses pelayanan kesehatan yang belum merata terutama di daerah terpencil. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia.

Tabel Distribusi Karakteristik Artikel Berdasarkan Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah Artikel	presentase
Kualitatif	9	60,0
Kuantitatif	2	13,3
Mixed methods	2	13,3
Systematic literature review	2	13,31
total	15	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif mendominasi artikel yang direview. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting lebih banyak dikaji melalui pendekatan eksploratif yang bertujuan memahami proses implementasi,

hambatan, dan faktor pendukung kebijakan. Sementara itu, penelitian kuantitatif dan mixed methods digunakan untuk mengukur efektivitas program maupun mengevaluasi capaian kebijakan berdasarkan indikator tertentu.

Selain variasi metode penelitian, artikel yang direview juga menunjukkan keberagaman lokasi penelitian. Sebagian besar penelitian dilakukan pada tingkat kabupaten/kota dengan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian lainnya menggunakan data nasional sehingga mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan secara lebih luas. Variasi lokasi penelitian tersebut memperkaya hasil sintesis karena memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kapasitas pemerintah daerah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2. Sintesis Tematik Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia

Tema	Subtema	Hasil Sintesis Literatur	Implikasi Terhadap Implementasi Kebijakan
Komunikasi kebijakan	Sosialisasi program	Sosialisasi mengenai stunting belum merata di seluruh lapisan masyarakat	Menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan stunting
	Edukasi gizi	Informasi terkait 1000 HPK, ASI Eksklusif, dan MP-ASI belum tersampaikan secara optimal	Perubahan perilaku Masyarakat berjalan lambat
Koordinasi lintas sektor	Kerjasama antar instansi	Program melibatkan sektor Kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial	Meningkatkan efektivitas program apabila koordinasi berjalan baik
	Sinkronisasi program	Masih ditemukan tumpang tindih kegiatan dan ego sektoral	Menurunkan efisiensi implementasi kebijakan
Ketersediaan sumber daya	SDM kesehatan	Keterbatasan tenaga gizi dan kader kesehatan masih ditemukan di beberapa daerah	Menghambat pelaksanaan intervensi stunting secara optimal
	Anggaran dan sarana	Keterbatasan anggaran dan fasilitas kesehatan terutama di daerah 3T	Menurunkan cakupan layanan kesehatan
Partisipasi masyarakat	Kehadiran posyandu	Partisipasi keluarga balita dalam kegiatan posyandu masih rendah	Pemantauan tumbuh kembang anak menjadi kurang optimal

	Dukungan keluarga	Tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi memengaruhi keterlibatan masyarakat	Menentukan keberhasilan program penurunan stunting
Efektivitas program	Penurunan prevalensi	Program menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting secara nasional	Menunjukkan adanya dampak positif kebijakan
	Ketimpangan wilayah	Keberhasilan program belum merata antar wilayah	Diperlukan penguatan implementasi di daerah tertinggal

Tabel 2. menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia dipengaruhi oleh lima tema utama, yaitu komunikasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan efektivitas program. Pada aspek komunikasi kebijakan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program dan edukasi gizi terkait stunting masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pemberian ASI eksklusif, serta praktik pemberian makanan pendamping ASI yang tepat sehingga perubahan perilaku pencegahan stunting berjalan lebih lambat.

Pada aspek koordinasi lintas sektor, hasil sintesis menunjukkan bahwa program penanggulangan stunting telah melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial. Namun, masih ditemukan permasalahan berupa tumpang tindih program dan kurang optimalnya sinkronisasi antarinstansi yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana kesehatan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menjadi kendala dalam pelaksanaan intervensi stunting.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan program penurunan stunting. Rendahnya kehadiran keluarga balita dalam kegiatan posyandu serta pengaruh tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi keluarga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi program. Sementara itu, dari aspek efektivitas program, berbagai penelitian menunjukkan adanya tren penurunan prevalensi stunting secara nasional sebagai dampak positif dari kebijakan yang telah diterapkan. Meskipun demikian, keberhasilan program belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan dan pemerataan sumber daya pada daerah yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi.

Tabel 2. Distribusi Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Jumlah
Implementasi penelitian	6
Evaluasi program	3
Faktor penghambat	3
Kebijakan nasional	2
Intervensi gizi	1

Berdasarkan hasil ekstraksi data, seluruh artikel kemudian dianalisis menggunakan pendekatan thematic synthesis. Proses sintesis menghasilkan lima tema utama yang paling sering muncul dalam berbagai penelitian, yaitu komunikasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan efektivitas implementasi kebijakan. Kelima tema tersebut dipilih karena secara konsisten muncul pada sebagian besar artikel dan dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan menjadi tema yang paling sering dibahas dalam berbagai penelitian. Mayoritas artikel menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat maupun pelaksana program. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor dominan karena keberhasilan program stunting memerlukan keterlibatan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama yang ditemukan pada sebagian besar penelitian.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan adanya penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir serta semakin kuatnya komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan program nasional. Namun demikian, keberhasilan implementasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, kondisi geografis, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat menyebabkan efektivitas kebijakan masih bervariasi antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih optimal.

DISKUSI

Komunikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil sintesis literatur, komunikasi kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. Komunikasi yang efektif diperlukan agar informasi mengenai pencegahan stunting, pemenuhan gizi, pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat dipahami oleh seluruh sasaran program. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan edukasi masih belum berjalan optimal di berbagai daerah sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan stunting.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang tidak tersampaikan secara jelas dan konsisten dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana program, dan masyarakat. Akibatnya, tujuan kebijakan sulit tercapai secara maksimal karena masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perubahan perilaku dalam pencegahan stunting.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui posyandu, puskesmas, dan kader kesehatan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi dan kesehatan anak. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi melalui berbagai media dan pendekatan berbasis masyarakat perlu terus ditingkatkan agar implementasi kebijakan stunting berjalan lebih efektif.

Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan stunting. Berdasarkan hasil kajian, masih ditemukan berbagai keterbatasan sumber daya, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan, maupun dukungan anggaran program.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga gizi dan tenaga kesehatan di beberapa daerah masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Selain itu, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, alat antropometri, serta dukungan logistik juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan status gizi balita.

Temuan ini sesuai dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperkuat sarana pelayanan kesehatan, serta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program stunting secara berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan stunting. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta berbagai kelompok sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, dan program edukasi gizi masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kesibukan orang tua, serta masih adanya kepercayaan atau budaya tertentu yang memengaruhi pola pemberian makanan pada anak.

Partisipasi masyarakat yang rendah dapat menghambat keberhasilan berbagai intervensi yang telah dirancang pemerintah. Sebaliknya, keterlibatan aktif masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan program karena masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya gizi, sanitasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat melalui edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan peran kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tren penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah menunjukkan capaian yang baik karena didukung oleh komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit, dan tingkat kemiskinan yang tinggi masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada kualitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, pemerataan akses pelayanan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan stunting dapat terus ditingkatkan dan target penurunan stunting nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 15 artikel ilmiah, implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui penerapan intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kolaborasi lintas sektor. Kebijakan pemerintah, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, telah berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Namun, angka prevalensi masih berada di atas standar yang ditetapkan WHO sehingga stunting tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan yang efektif, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, partisipasi masyarakat, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Sebaliknya, berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya edukasi dan partisipasi masyarakat, serta ketimpangan akses pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan wilayah 3T, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, pemerataan sarana pelayanan kesehatan, optimalisasi edukasi masyarakat mengenai pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi. Dengan upaya tersebut, implementasi kebijakan penanggulangan stunting diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung tercapainya target penurunan stunting nasional serta terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan produktif.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial agar implementasi kebijakan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih terintegrasi dan efektif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu, pemerataan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta optimalisasi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan berbagai pemangku kepentingan juga perlu terus didorong untuk mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan sehingga target penurunan stunting nasional dapat tercapai secara optimal.

KETERBATASAN

Penelitian ini terbatas pada analisis literatur yang tersedia di database Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, dan Garuda sehingga hasil kajian sangat bergantung pada kualitas serta kelengkapan artikel yang dipublikasikan. Selain itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara spesifik kondisi implementasi kebijakan penanggulangan stunting pada setiap daerah di Indonesia karena karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan variasi konteks daerah serta memerlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240. <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id>

- Anggraeni, S., et al. (2023). Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 145–158. <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Atrill, P., McLaney, E., & Harvey, D. (2015). *Accounting: An introduction* (6th ed.). Melbourne: Pearson. <https://doi.org/10.1002/9781118267745.ch6>
- Boedy, A., Rahman, F., & Putri, N. (2025). Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1), 22–34. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki>
- Cachon, G. P., & Terwiesch, C. (2013). *Matching Supply with Demand: An Introduction to Operations Management* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. <https://doi.org/10.2307/1271510>
- Coppola, D. P. (2011). *Introduction to International Disaster Management* (3rd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-64027-7>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, R., et al. (2023). Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Penurunan Prevalensi Stunting di Wilayah Pedesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan*, 8(2), 89–101. <https://scholar.google.com>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Lee, J. Y., Kozlenkova, I. V., & Palmatier, R. W. (2014). Structural marketing: Using organizational structure to achieve marketing objectives. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 73–99. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0402-9>
- Moorman, C., & Day, G. S. (2016). Organizing for Marketing Excellence. *Journal of Marketing*, 80(6), 6–35. <https://doi.org/10.1509/jm.15.0423>
- Nurva, M., et al. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45–56. <https://scholar.google.com>
- Oktavia, R., Siregar, D., & Wahyuni, N. (2024). Evaluasi implementasi program percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 12(1), 40–52. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i1>
- Ponum, M., Khan, S., Hasan, M., & Karim, R. (2020). Stunting prevention and nutritional policy in developing countries. *International Journal of Public Health*, 8(3), 210–218. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
- Pratiwi, A., & Handayani, S. (2024). Evaluasi Kinerja Kader Posyandu dalam Program Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 10(1), 12–23. <https://garuda.kemdikbud.go.id>

-
- Rahman, A., & Suryadi, T. (2022). Peran Kerja Sama Lintas Sektor Menggunakan Pendekatan Pentahelix dalam Kebijakan Akselerasi Penurunan Stunting. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(2), 134–148. <https://scholar.google.com>
- Saputra, D., Hidayat, R., & Lestari, A. (2022). Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(1), 30–39. <https://doi.org/10.22146/jkki.v11i1>
- Siswati. (2024). Analisis kebijakan Rencana Aksi Daerah Membangun Generasi Unggul Melalui 8000 Hari Pertama Kehidupan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 90–102. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jap>
- UNICEF. (2023). *Child Nutrition Report 2023: Nutrition Security in Developing Nations*. New York: UNICEF. <https://www.unicef.org>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration and Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1171/0095399719750060404>
- Walker, S. P. (2015). Accounting and Preserving the American Way of Life. *Contemporary Accounting Research*, 32(4), 1676–1713. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12128>
- World Health Organization. (2023). *Stunting in Children: Global Health Report*. Geneva: WHO. <https://www.who.int>
- Yuliani, E., Rahmawati, D., & Sari, P. (2023). Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Stunting di Daerah Terpencil Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 110–121. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>